

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. cet. 5. Bandung: Refika Aditama. 2018.
- . *Kebatalan dan Pemahaman Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan*. cet. 1. Salatiga: Griya Media. 2011.
- Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ghofur, Abdul Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persepektif Hukum dan Etika*. cet. 2. Yogyakarta : UII Press. 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgelijk Wetboek” dan Undang-Undang Perkawinan* cet. 2. Yogyakarta : Laksbang Grafika. 2012.
- Harris, Freedy dan Teddy Anggoro. *Hukum Perseroan Terbatas*. cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Cet. 1. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.
- Prasetya, Rudhi. *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*. Jakarta : PT.Raja grafindo Persada. 2016.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek PertanggungJawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju. 2011.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : Rafika Aditama, 2006

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat. 2003.

Widjaja, I.G Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoin. 2000.

Yahya M. Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.

Artikel :

Widiyastuti, Octantina. Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Sayuna, Inche. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2016.

Internet :

“Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025.

Keputusan Menteri :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Keo/1988 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

